

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2014

OUTLINE ANALISIS PROVINSI

1. Perkembangan Indikator Utama
 - 1.1 Pertumbuhan Ekonomi
 - 1.2 Pengurangan Pengangguran
 - 1.3 Pengurangan Kemiskinan
2. Kinerja Pembangunan Kota/Kabupaten
 - 2.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan kemiskinan
 - 2.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM
 - 2.3 Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran
 - 2.4 Kesenjangan Wilayah
3. Penyebab Permasalahan Pembangunan
 - 3.1 Tingginya Ketergantungan terhadap Sektor Primer (Pertanian)
 - 3.2 Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - 3.3 Rendahnya Kualitas lapangan Kerja
 - 3.4 Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah
 - 3.5 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 3.6 Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat
 - 3.7 Rendahnya Kualitas Belanja Daerah
4. Prospek Pembangunan Tahun 2015
5. Penutup
 - 5.1 Isu Strategis Daerah
 - 5.2 Rekomendasi Kebijakan



Desember 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

Perkembangan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan 2014

SERI ANALISA PEMBANGUNAN DAERAH

A. Perkembangan Indikator Utama

1. Pertumbuhan Ekonomi

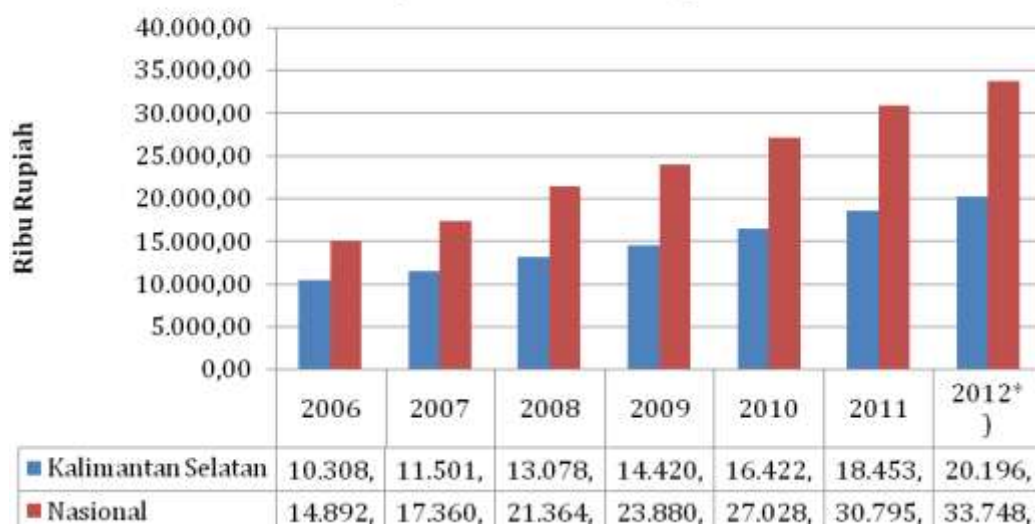
Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional terutama sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, industri non migas juga cukup berkembang. Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki komoditas utama kelapa sawit dan karet. Selama periode 2006-2013 kinerja perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan relatif cukup baik. Perekonomian daerah tumbuh dengan laju rata-rata 5,67 persen per tahun. Dari perspektif wilayah, kontribusi PDRB Kalimantan Selatan terhadap output wilayah Kalimantan sebesar 12,13 persen, dan berkontribusi sebesar 1,13 persen terhadap pembentukan PDB nasional. Dari sisi besaran, perekonomian Kalimantan Selatan menduduki peringkat ketiga di Wilayah Kalimantan.



Sumber: BPS, 2013

Dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup bersaing dengan laju pertumbuhan nasional, Provinsi Kalimantan Selatan belum mampu menutup kesenjangan pendapatan perkapita dari rata-rata pendapatan perkapita nasional. Rasio PDRB per kapita antara Kalimantan Selatan dan nasional menurun dari 69,21 persen menjadi 59,85 persen selama periode 2006-2012. Di tingkat wilayah Kalimantan, PDRB perkapita Kalimantan Selatan berada pada posisi ketiga. Tantangan yang dihadapi pemerintah daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan landasan ekonomi daerah yang memperluas kesempatan kerja dan mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 2
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku

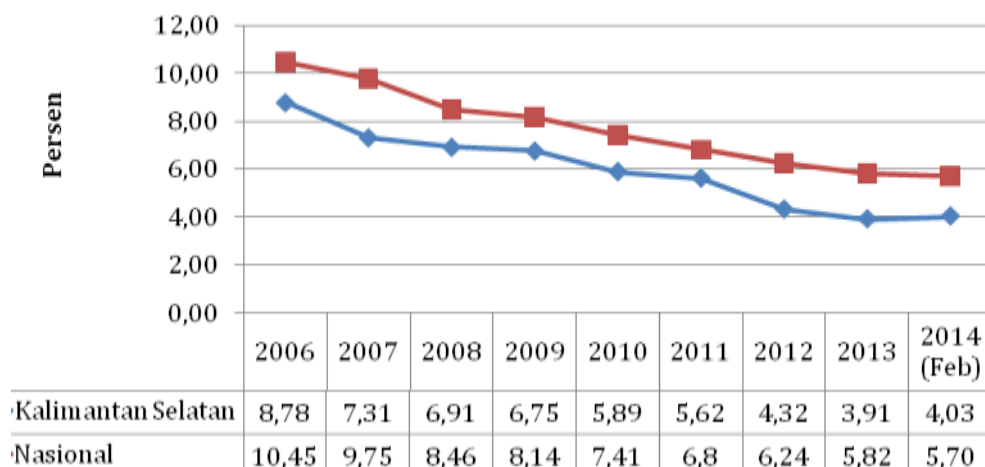


Sumber: BPS, 2013

2. Pengurangan Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Selatan selama 2006-2013 berkurang sebesar 4,87 persen (Gambar 3). Pada tahun 2006 tingkat pengangguran daerah tinggi karena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi di Kalimantan Selatan masih sangat sensitif terhadap gejolak harga BBM. Perbandingan secara nasional menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kalimantan Selatan tergolong rendah. Dengan PDRB per kapitayang relatif rendah, kondisi ini menyiratkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya nilai tambah yang diciptakan perekonomian daerah. Dengan demikian, tantangan yang harus diatasi adalah peningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang dapat menyerap tenaga kerja relatif tinggi.

Gambar 3
Tingkat Pengangguran Terbuka

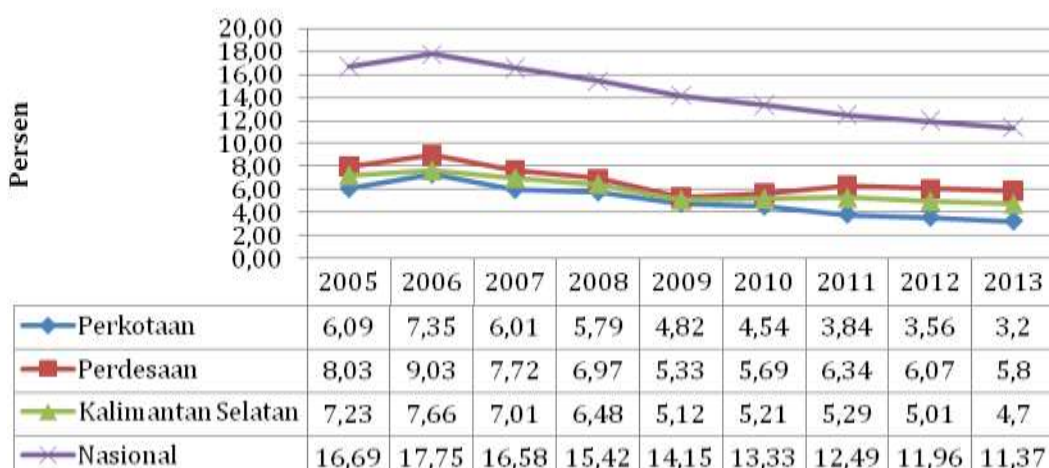


Sumber: BPS, 2014

3. Pengurangan Kemiskinan

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penurunan pengangguran, tingkat kemiskinan daerah juga berhasil ditekan. Selama periode 2006-2013, persentase penduduk miskin menurun dari 7,66 persen menjadi 4,77 persen (Gambar 4). Tantangan yang harus dihadapi adalah tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan dengan laju penurunan yang relatif lambat. Hal ini mengaskan adanya stagnasi pertumbuhan sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya di perdesaan. Selain itu, laju penurunan kemiskinan di perkotaan yang relatif lambat juga perlu dipercepat.

Gambar 4
Persentase Penduduk Miskin



Sumber: BPS, 2014

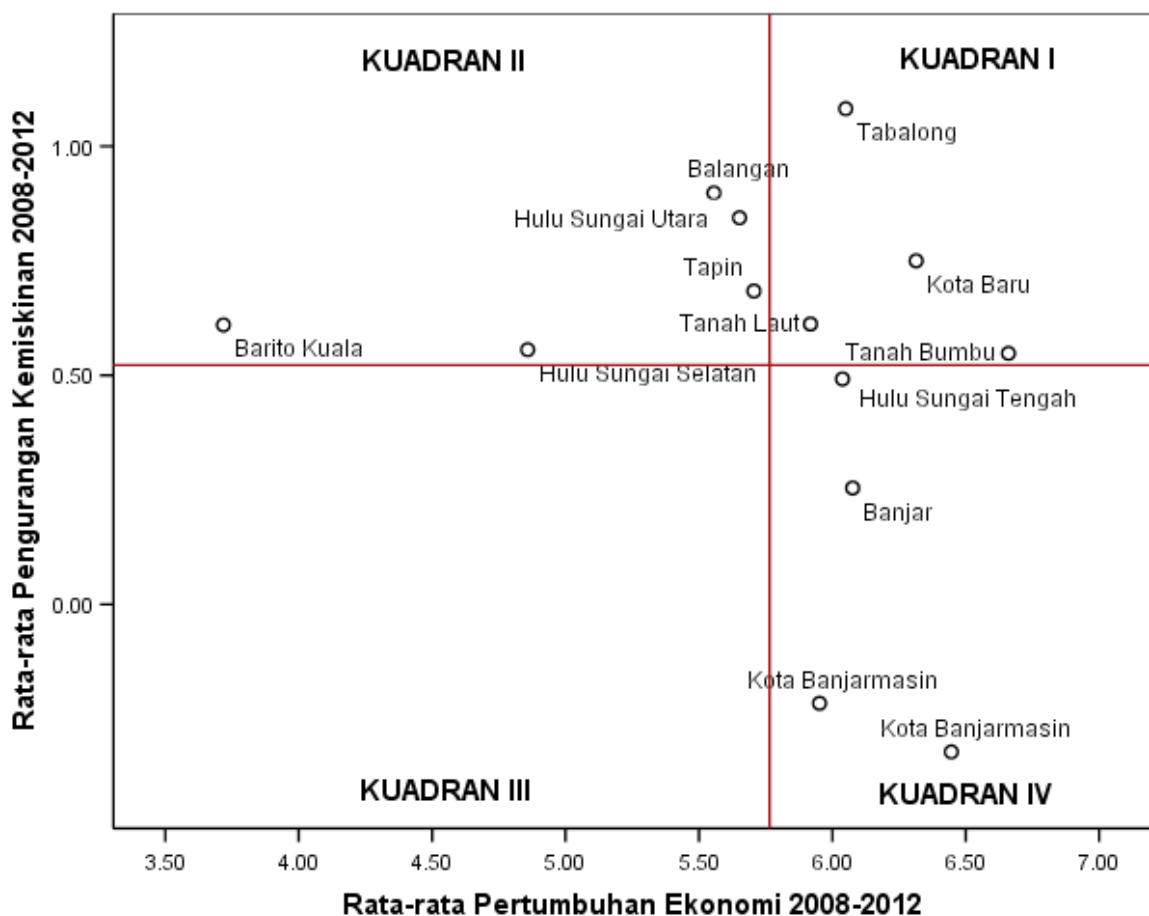
B. Kinerja Pembangunan Kabupaten/ Kota

Kualitas pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi biasanya diikuti oleh pengurangan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta perluasan lapangan kerja.

1. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan

Gambar 5 menunjukkan persebaran kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan tahun 2008 sampai dengan tahun 2012, dengan penjelasan sebagai berikut. *Pertama*, Kabupaten Tabalong, Kotabaru, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu merupakan daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di atas rata-rata provinsi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi dapat mendorong pengurangan kemiskinan secara lebih cepat (*pro-growth, pro-poor*). Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap meningkatkan upaya pengurangan kemiskinan..

Gambar 5
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kedua, Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Utara, Tapi, Hulu Sungai Selatan, dan Barito Kuala terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di atas rata-rata (*low growth, pro-poor*). Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta perdagangan dan jasa.

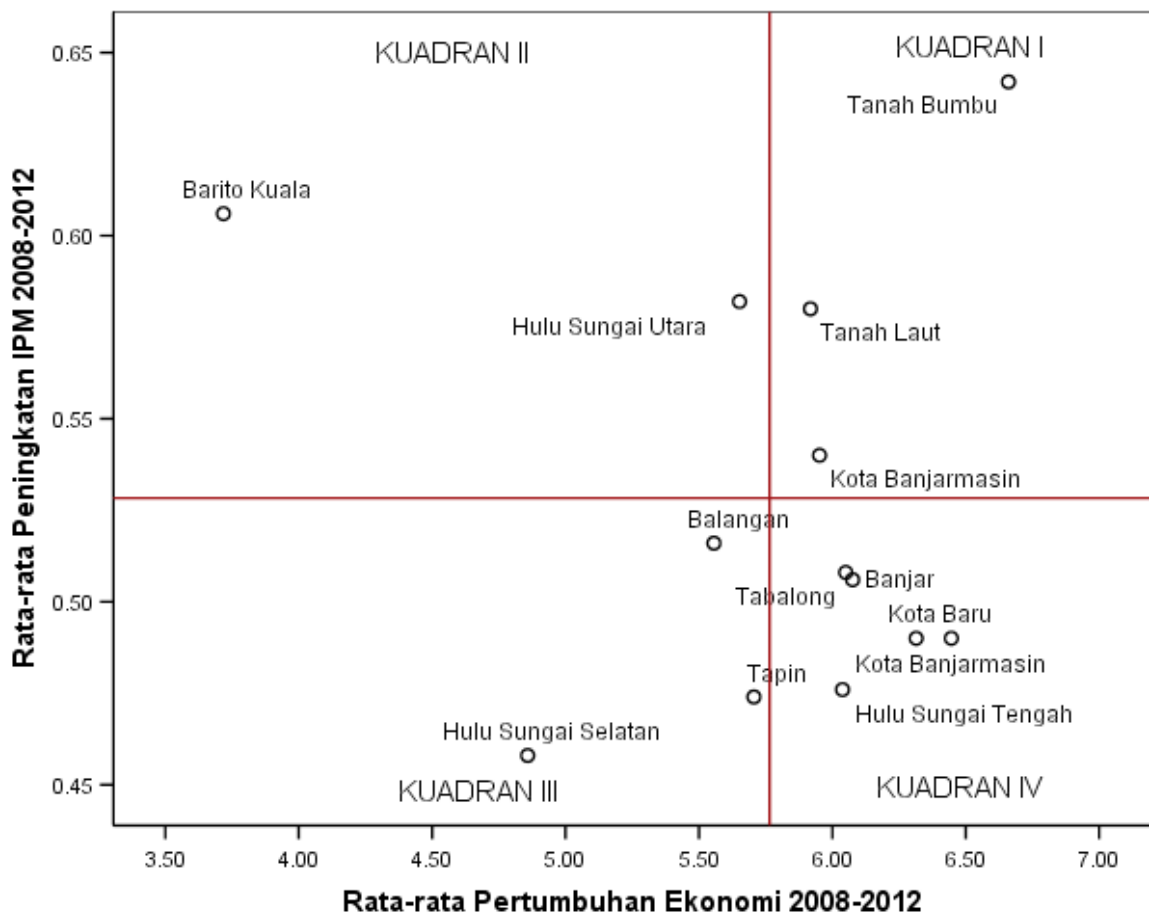
Ketiga, tidak ada daerah yang terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-poor*). *Keempat*, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Banjar, Kota Banjarmasin terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro poor*). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah tersebut belum memberi dampak penurunan angka kemiskinan secara nyata. Tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan, serta usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Tantangan lainnya adalah meningkatkan koordinasi sinergi dalam mengoptimalkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2. Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan IPM

Gambar 6 menunjukkan distribusi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Tanah Bumbu, Tanah Laut dan Kota Banjarmasin masuk daerah dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi sejalan dengan peningkatan IPM (*pro-growth, pro-human development*). Dengan kinerja yang baik ini, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah, dan sekaligus mempertahankan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan.

Kedua, Kabupaten Barito Kuala dan Hulu Sungai Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi peningkatan IPM di atas rata-rata (*low growth, pro-human development*). Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan untuk meningkatkan pelayanan publik dapat meningkatkan IPM. Tantangan yang harus diatasi adalah mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya lokal seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Gambar 6
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Peningkatan IPM Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Ketiga, Hulu Sungai Selatan, Balangan, dan Tapin terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-human development*). Kondisi ini menegaskan perlunya pemerintah daerah membenahi pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bekerja keras mendorong seluruh SKPD untuk memacu pembangunan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.

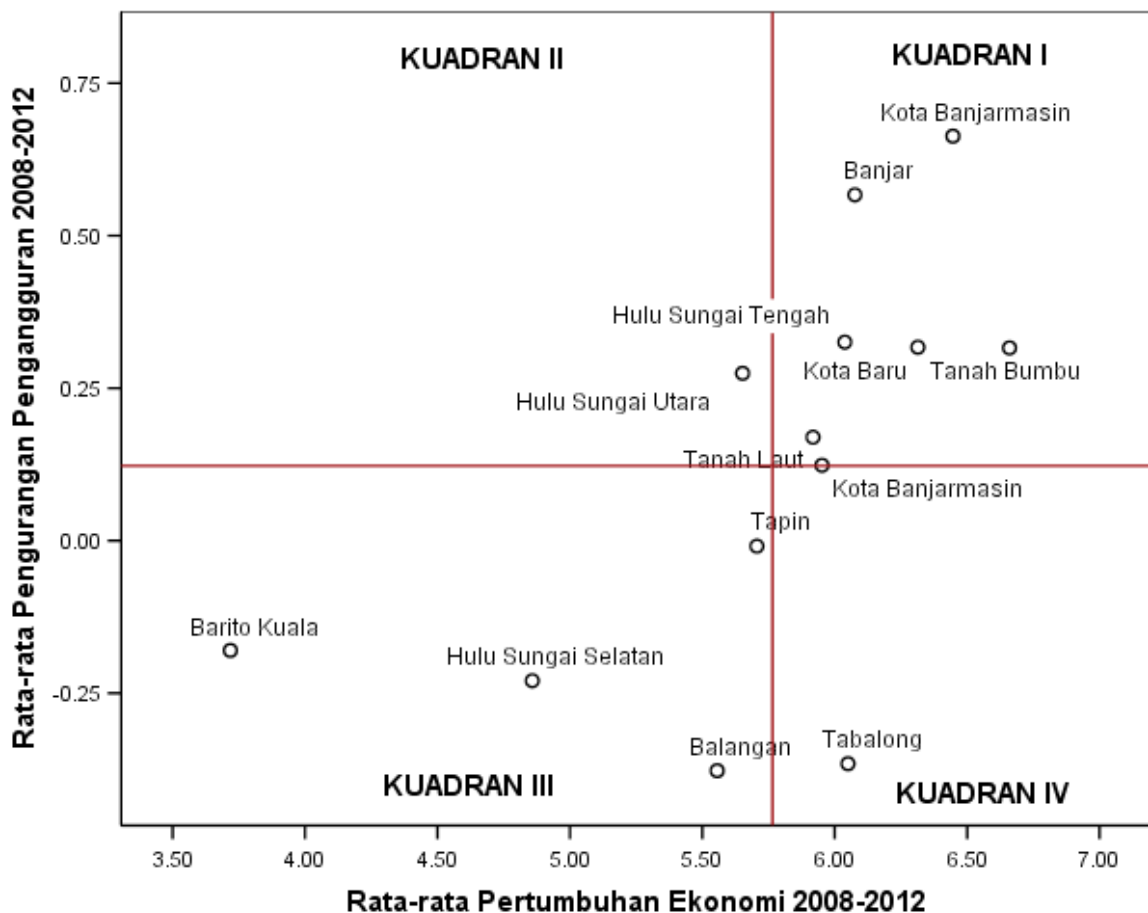
Keempat, Kabupaten Banjar, tabalong, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi peningkatan IPM di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro human development*). Tantangan bagi pemerintah daerah adalah menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan peningkatan mutu pelayanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Pengangguran

Gambar 7 menunjukkan persebaran kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan menurut rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran selama tahun 2008-2012. *Pertama*, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kota Banjarmasin dan Kota Baru termasuk kabupaten dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mendorong perluasan lapangan kerja (*pro-growth, pro-job*). Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjaga momentum pertumbuhan dengan tetap meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan.

Kedua, Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terletak di kuadran II termasuk kategori daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di atas rata-rata (*low growth, pro-job*). Hal ini mengindikasikan bahwa perluasan lapangan kerja terjadi pada sektor ekonomi dengan pertumbuhan rendah seperti pertanian dan perikanan.

Gambar 7
Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Rata-Rata Pengurangan Jumlah Pengangguran Tahun 2008-2012



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

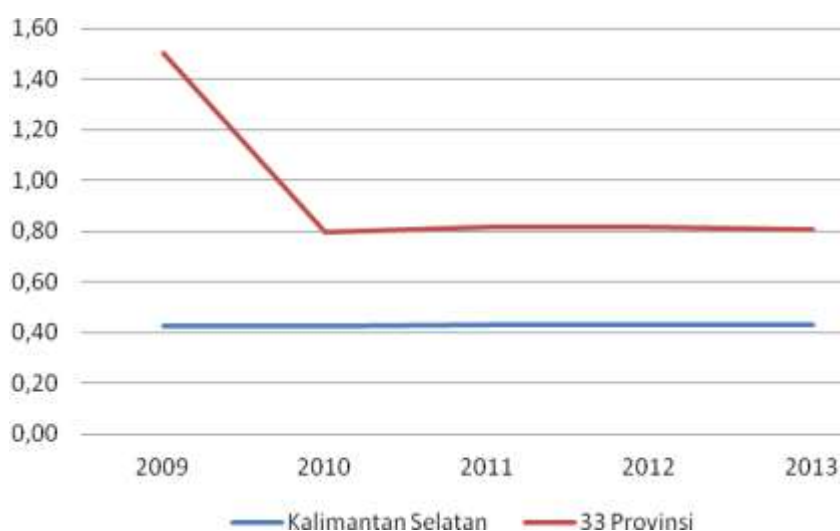
Ketiga, Kabupaten Barito Kuala Tapin, Balangan, dan Hulu Sungai Selatan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran di bawah rata-rata provinsi (*low growth, less pro-job*). Hal ini menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar.

Keempat, Kabupaten Tabalong dan Kota Banjarmasin terletak di kuadran IV dengan rata-rata pertumbuhan tinggi di atas rata-rata, tapi pengurangan pengangguran di bawah rata-rata (*high-growth, less-pro job*). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di wilayah tersebut, tetapi tidak dapat menurunkan jumlah pengangguran. Daerah tersebut termasuk daerah perkebunan, dan daerah perkotaan yang harus menampung migrasi penduduk dari daerah perdesaan. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong pengembangan sektor dan kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja relatif tinggi seperti pertanian dan perkebunan. Tantangan lainnya adalah mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang mampu menyerap tenaga kerja di sektor informal.

4. Kesenjangan Ekonomi

Tingkat kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditunjukkan dengan nilai indeks wiliamson dari tahun 2009-2013 cukup tinggi. Kesenjangan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di bawah nasional dengan kecenderungan semakin meningkat. Penyebab kesenjangan ekonomi Kalimantan Selatan adalah kurangnya investasi, kurangnya keberadaan sektor industri besar, serta kualitas tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga mengurangi kesenjangan di daerah. Keberadaan sektor pertambangan turut meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan sehingga meninggaljan daerah lain yang struktur perekonomiannya didominasi oleh sektor pertanian.

Gambar 8
Perkembangan Kesenjangan Ekonomi (Indeks Williamson)
Provinsi Kalimantan Selatan 2009-2013



Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Kesenjangan ekonomi antarkota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan cukup tinggi, terlihat dari besarnya gap antara kabupaten atau kota dengan PDRB perkapita tertinggi dan PDRB perkapita terendah. Tingginya pendapatan per kapita di Kota Baru didukung oleh sumber daya alam yang dimiliki terutama pertambangan. Keberadaan tambang batu bara di Kota Baru turut meningkatkan pendapatan perkapita di daerah.

Tabel 1
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHB dengan Migas Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2007-2012 (000/jiwa)

| Kab/ Kota | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Tanah Laut | 10.469 | 11.286 | 12.370 | 13.914 | 15.685 | 17.415 |
| Kota Baru | 24.569 | 27.038 | 29.688 | 33.143 | 36.980 | 40.079 |
| Banjar | 9.537 | 10.848 | 12.352 | 13.634 | 14.939 | 16.374 |
| Barito Kuala | 10.595 | 11.208 | 11.936 | 13.067 | 14.206 | 15.731 |
| Tapin | 9.568 | 10.989 | 12.088 | 13.173 | 14.168 | 15.338 |
| Hulu Sungai Selatan | 7.180 | 8.233 | 9.160 | 10.166 | 10.954 | 11.935 |
| Hulu Sungai Tengah | 5.922 | 6.861 | 7.909 | 8.796 | 9.703 | 10.709 |
| Hulu Sungai Utara | 5.030 | 5.642 | 6.425 | 7.372 | 8.434 | 9.322 |
| Tabalong | 16.656 | 17.712 | 20.738 | 23.854 | 27.601 | 31.191 |
| Tanah Bumbu | 16.961 | 18.906 | 21.616 | 24.023 | 26.796 | 28.926 |
| Balangan | 17.528 | 19.081 | 21.033 | 23.858 | 26.843 | 29.922 |
| Kota Banjarmasin | 11.232 | 12.380 | 14.218 | 15.528 | 17.666 | 19.484 |
| Kota Banjar Baru | 7.425 | 8.205 | 8.871 | 9.382 | 10.401 | 11.126 |
| KALIMANTAN SELATAN | 11.502 | 13.114 | 14.440 | 16.422 | 18.453 | 20.197 |

Sumber: BPS, 2013

C. Penyebab Permasalahan Pembangunan

1. Ketergantungan pada Sektor Primer (Pertambangan dan Pertanian)

Struktur perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2013 didominasi oleh sektor pertambangan, pertanian, dan perdagangan (Tabel 2). Peran sektor pertanian sebagai pendorong utama pertumbuhan daerah semakin meningkat. Laju pertumbuhan sektor pertanian meningkat dan semakin penting sebagai pendorong pertumbuhan daerah. Sektor industri pengolahan hanya berkontribusi sebesar 8 persen, sementara itu sektor utilitas yang mendukung industrialisasi (listrik, gas, air) hanya berkontribusi di bawah 1 persen.

Sektor penting lainnya bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan laju pertumbuhan yang cukup cepat pada tahun 2013. Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan juga dilihat dari perkembangan sektor yang menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan (*tradeable sector*). Tabel 3 menunjukkan nilai LQ sektor usaha di Kalimantan Selatan. Sektor utama (basis) Provinsi Kalimantan Selatan adalah pertanian dan pertambangan.

Tabel 2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha (2013)

| No. | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase (%) | |
|-----|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| | | PDRB ADHB | PDRB ADHK 2000 |
| 1. | Pertanian | 18,79 | 22,24 |
| 2. | Pertambangan | 22,25 | 20,79 |
| 3. | Industri Pengolahan | 8,93 | 10,04 |
| 4. | Listrik, Gas, Air Minum | 0,57 | 0,52 |
| 5. | Konstruksi | 6,17 | 6,04 |
| 6. | Perdagangan, Hotel, Restauran | 16,93 | 16,88 |
| 7. | Angkutan, Telekomunikasi | 8,94 | 9,08 |
| 8. | Keuangan | 5,47 | 4,43 |
| 9. | Jasa-jasa | 11,94 | 9,98 |
| | | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS, 2013

Nilai *location quotient* subsektor perkebunan sangat tinggi apabila dibandingkan dengan sub sektor pertanian lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa *share* subsektor tersebut untuk Provinsi Kalimantan Selatan secara proporsional lebih tinggi dari nasional. Dengan kata lain, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki keunggulan komparatif pada sektor-sektor tersebut dibanding daerah-daerah lain. Kecenderungan menarik adalah semakin menguatnya nilai LQ pada industri makanan dan minuman yang mengindikasikan peluang dan potensi Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengembangkan industri tersebut. Oleh sebab itu, Provinsi Kalimantan Selatan perlu mengembangkan subsektor-subsektor industri pengolahan lain khususnya yang memiliki kaitan kuat dengan komoditas unggulan daerah.

Tabel 3
Nilai LQ Sektor Perekonomian Kalimantan Selatan 2008-2012

| Lapangan Usaha | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------|------|------|------|------|
| 1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan | 1,77 | 1,80 | 1,79 | 1,81 | 1,81 |
| a. Tanaman Bahan Makanan | 1,63 | 1,66 | 1,62 | 1,65 | 1,64 |
| b. Tanaman Perkebunan | 2,82 | 2,92 | 3,05 | 3,07 | 3,09 |
| c. Peternakan | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,01 |
| d. Kehutanan | 1,51 | 1,49 | 1,47 | 1,48 | 1,48 |
| e. Perikanan | 1,88 | 1,87 | 1,85 | 1,82 | 1,80 |
| 2. Pertambangan dan Penggalian | 2,67 | 2,64 | 2,75 | 2,89 | 2,93 |
| a. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | 0,36 |
| b. Pertambangan Bukan Migas | 6,99 | 6,50 | 6,61 | 6,88 | 6,67 |
| c. Penggalian | 1,16 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,18 |
| 3. Industri Pengolahan | 0,42 | 0,42 | 0,41 | 0,40 | 0,40 |
| a. Industri Migas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1). Pengilangan Minyak Bumi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lapangan Usaha | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------|------|------|------|------|
| 2). Gas Alam Cair (LNG) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b. Industri Bukan Migas | 0,46 | 0,45 | 0,45 | 0,43 | 0,42 |
| 4. Listrik, Gas & Air Bersih | 0,69 | 0,63 | 0,65 | 0,66 | 0,67 |
| a. Listrik | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,78 | 0,78 |
| b. Gas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c. Air Bersih | 1,27 | 1,29 | 1,32 | 1,38 | 1,44 |
| 5. Konstruksi | 0,87 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,90 |
| 6. Perdagangan, Hotel & Restoran | 0,87 | 0,90 | 0,90 | 0,89 | 0,91 |
| a. Perdagangan Besar dan Eceran | 0,92 | 0,96 | 0,95 | 0,93 | 0,95 |
| b. Hotel | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| c. Restoran | 0,71 | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,81 |
| 7. Pengangkutan dan Komunikasi | 1,08 | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 0,88 |
| a. Pengangkutan | 2,05 | 2,03 | 2,01 | 1,99 | 2,00 |
| 1). Angkutan Rel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2). Angkutan Jalan Raya | 2,15 | 2,13 | 2,17 | 2,20 | 2,22 |
| 3). Angkutan Laut | 6,29 | 6,55 | 6,87 | 6,95 | 7,07 |
| 4). Angkutan Sungai, Danau & Penyeberangan | 2,67 | 2,66 | 2,57 | 2,58 | 2,50 |
| 5). Angkutan Udara | 1,14 | 1,08 | 0,98 | 0,94 | 0,96 |
| 6). Jasa Penunjang Angkutan | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,41 |
| b. Komunikasi | 0,28 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| 8. Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan | 0,41 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,44 |
| a. Bank | 0,36 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,41 |
| b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,41 |
| c. Jasa Penunjang Keuangan | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| d. Real Estat | 0,71 | 0,72 | 0,73 | 0,73 | 0,74 |
| e. Jasa Perusahaan | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 9. Jasa-jasa | 0,95 | 0,95 | 0,98 | 1,00 | 1,03 |
| a. Pemerintahan Umum | 1,99 | 2,02 | 2,10 | 2,18 | 2,34 |
| b. Swasta | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| 1). Jasa Sosial Masyarakat | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,24 |
| 2). Jasa Hiburan dan Rekreasi | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3). Jasa Perorangan dan Rumah tangga | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Nilai LQ dihitung menggunakan PDRB ADHK Tahun 2000

Sumber: BPS, 2012 (diolah)

Pertumbuhan sektor industri pengolahan memiliki arti yang sangat strategis bagi perekonomian daerah dalam dua hal. Pertama, permintaan terhadap produk manufaktur relatif lebih elastis terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dibanding permintaan terhadap komoditas pertanian primer. Kecenderungan meningkatnya pendapatan masyarakat dan bertambahnya proporsi kelas menengah diperkirakan akan disertai dengan meningkatnya permintaan barang-barang konsumsi yang dihasilkan dari sektor industri. Kedua, sektor industri pengolahan memiliki kelebihan dibanding sektor-sektor

lain dalam penciptaan nilai tambah, dan dampak berganda bagi pengembangan sektor-sektor lain melalui kaitan ke depan (sektor pengguna) dan ke belakang (sektor penyedia input), serta penciptaan lapangan kerja.

Selama periode 2010-2014 sektor perdagangan dan jasa-jasa mampu menciptakan lapangan kerja secara signifikan meskipun memberikan kontribusi kecil pada perekonomian (Tabel 4). Ke depan, sektor industri pengolahan masih perlu berkembang lagi sehingga mampu menyerap angkatan kerja baru dan menyerap tenaga kerja yang menumpuk di sektor perdagangan dan jasa-jasa yang kurang produktif.

Tabel 4
Perubahan Jumlah Orang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan 2010-2014

| No. | Lapangan Pekerjaan | 2014 | | Perubahan |
|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | (Feb) | |
| 1 | Pertanian | 747.772 | 713.424 | -34.348 |
| 2 | Pertambangan | 55.550 | 94.364 | 532 |
| 3 | Industri Pengolahan | 117.040 | 208.737 | -13.425 |
| 4 | Listrik, Gas, Air | 3.981 | 8.154 | 161 |
| 5 | Bangunan | 63.624 | 128.293 | 4.694 |
| 6 | Perdagangan, Hotel, Restoran | 410.143 | 381.730 | 106.435 |
| 7 | Angkutan & Telekomunikasi | 87.280 | 89.887 | 25.972 |
| 8 | Keuangan | 21.917 | 28.099 | 13.388 |
| 9 | Jasa-Jasa | 231.059 | 283.792 | 52.733 |
| Total | | 1.738.366 | 1.936.480 | 156.142 |

Sumber : BPS, 2013

2. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi penggunaan (pengeluaran), pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2013 adalah ekspor dan impor. Pada tahun 2009, ekspor mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) cukup tajam. Hal ini tampaknya terkait dengan krisis ekonomi dunia yang diiringi pelemahan permintaan komoditas ekspor dari negara-negara maju. Pada tahun-tahun sebelumnya peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan.

Tabel 5
PDRB Menurut Penggunaan 2013

| No. | Lapangan Usaha | Distribusi Persentase (%) | |
|-------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| | | PDRB ADHB | PDRB ADHK 2000 |
| 1. | Konsumsi Rumah Tangga | 49,04 | 45,93 |
| 2. | Konsumsi Lembaga Nirlaba | 0,49 | 0,45 |
| 3. | Konsumsi Pemerintah | 16,16 | 13,48 |
| 4. | PMTB | 22,43 | 19,37 |
| 5. | Perubahan Stok | 3,45 | 2,89 |
| 6. | Ekspor | 58,76 | 60,58 |
| 7. | Impor | 50,33 | 42,82 |
| Total | | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS, 2013

Dengan menyusutnya volume ekspor, pertumbuhan daerah pada tahun 2009 ditopang oleh konsumsi masyarakat. Pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Sementara itu, pertumbuhan yang terlalu bertumpu pada konsumsi masyarakat memiliki batas dan tidak berkelanjutan. Dalam jangka menengah kondisi ini akan mengurangi potensi tabungan masyarakat. Padahal tabungan sangat penting bagi perekonomian karena dapat menjadi sumber investasi sektor produktif melalui intermediasi perbankan. Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

Mengingat pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal yang perlu ditingkatkan adalah iklim usaha di daerah. Iklim usaha yang kondusif bagi investasi terbentuk dari kualitas regulasi yang konsisten, perpajakan yang transparan dan tidak tumpang tindih, pelayanan perijinan yang efisien, dan kelembagaan penyelesaian konflik yang efektif. Langkah penting dalam perbaikan pelayanan perijinan adalah pelaksanaan dan penerapan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara sungguh-sungguh dan konsisten. Dalam hal ini, semua kabupaten/kota di Kalimantan Selatan secara formal telah memiliki badan/kantor yang menyelenggarakan PTSP. Ukuran keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut adalah peningkatan efisiensi perijinan yang harus tercermin dari menurunnya biaya dan waktu yang diperlukan oleh para pelaku usaha.

3. Rendahnya Kualitas Lapangan Kerja

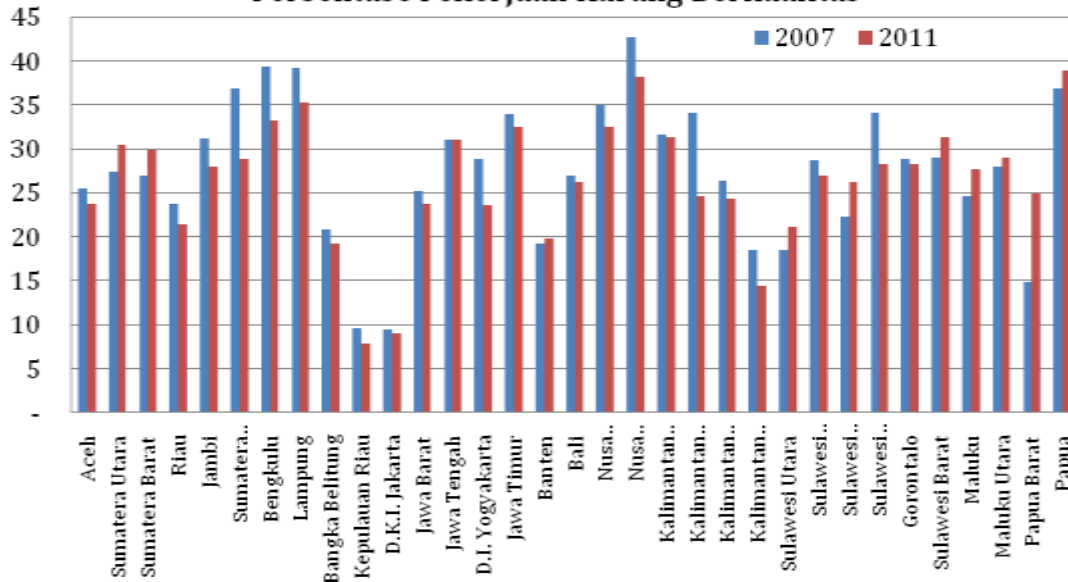
Salah satu penyebab dari rendahnya PDRB/kapita dan masih tingginya kemiskinan daerah adalah rendahnya kualitas lapangan kerja yang tersedia. Kondisi ini dapat diamati daritingginya persentase pekerja dengan status pekerjaan kurang berkualitas, yakni pekerja bebas pertanian, pekerja bebas non pertanian, dan pekerja tak dibayar. Para pekerja di kelompok ini sangat rentan untuk terjerumus dalam lingkaran kemiskinan karena sifat pekerjaan yang tidak pasti dan umumnya mendapatkan upah yang sangat rendah. Dengan kata lain, tingkat pengangguran terbuka yang rendah di Kalimantan Selatan adalah karena masyarakat bersedia bekerja apa saja untuk mempertahankan hidup. Pada tahun 2011, persentase pekerjaan kurang berkualitas di Kalimantan Selatan sedikit menurun dari setahun sebelumnya, tetapi angkanya masih cukup tinggi di Wilayah Kalimantan.

Di samping itu, penurunan tingkat pengangguran juga melambat sejak tahun 2008. Hal ini mungkin berkaitan dengan melemahnya permintaan atas komoditas ekspor akibat krisis ekonomi dunia. Melemahnya permintaan di pasar dunia di samping menurunkan volume ekspor juga biasanya diikuti oleh turunnya harga komoditas. Gejolak pasar dunia tentu saja berdampak terhadap ekspor komoditas andalan ekspor Kalimantan Barat seperti kopi, kakao, sawit, dan karet.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan belum berhasil mengoptimalkan potensi sumber daya alam dan posisi geografis yang strategis untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah tidak

boleh berpuas diri dengan indikator pengangguran yang rendah. Tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah daerah adalah perlunya mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian yang dapat menciptakan lapangan kerja alternatif dan lebih berkualitas serta memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar.

Gambar 9
Persentase Pekerjaan Kurang Berkualitas



Sumber: BPS, 2012

4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Optimalisasi posisi Kalimantan Selatan yang dapat mendukung pengembangan wilayah Kalimantan mutlak membutuhkan dukungan prasarana perhubungan yang baik khususnya mempelancar lalulintas penduduk dan distribusi barang. Salah satu prasarana utama adalah jalan. Kondisi ketersediaan jalan di Kalimantan Selatan belum cukup walaupun tingkat kepadatan jalan di atas rata-rata nasional (Tabel 6).

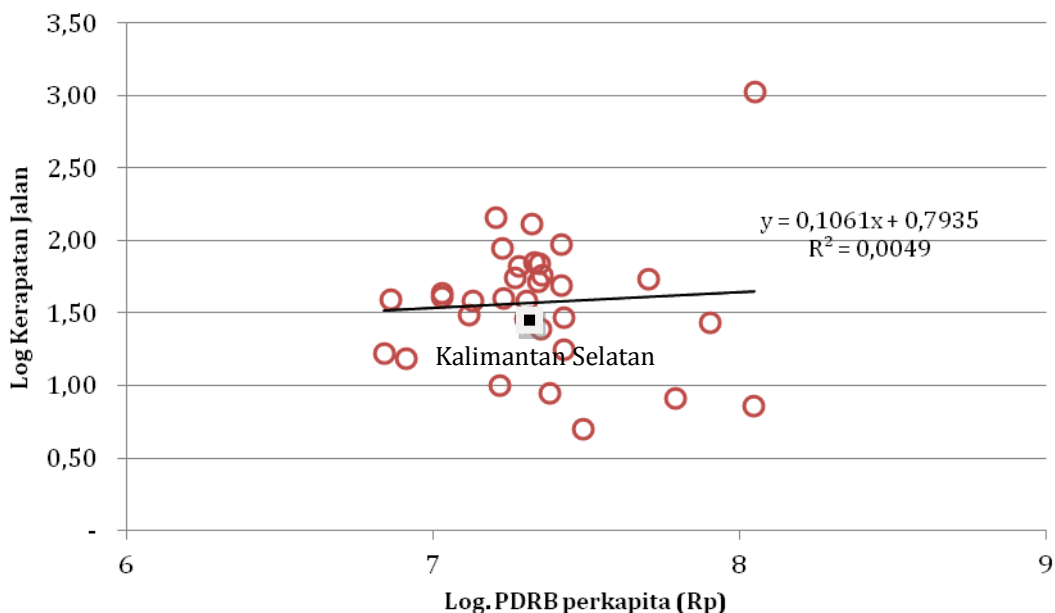
Tabel 6
Kepadatan Jalan dan PDRB Per Kapita Provinsi Tahun 2012

| No | Provinsi | PDRB per kapita (Ribu Rp) | Kepadatan Jalan |
|----|------------------|---------------------------|-----------------|
| 1 | DKI Jakarta | 111.913 | 1.068,36 |
| 2 | DIY | 16.054 | 146,56 |
| 3 | Bali | 20.948 | 130,28 |
| 4 | Jawa Timur | 26.274 | 95,37 |
| 5 | Jawa Tengah | 16.864 | 88,75 |
| 6 | Jawa Barat | 21.274 | 72,08 |
| 7 | Sulawesi Selatan | 22.151 | 69,68 |
| 8 | Banten | 19.038 | 66,81 |
| 9 | Sulawesi Utara | 22.624 | 57,89 |
| 10 | Lampung | 18.460 | 56,44 |
| 11 | Kep. Riau | 50.174 | 54,95 |
| 12 | Sumatera Barat | 22.035 | 52,36 |

| No | Provinsi | PDRB per kapita (Ribu Rp) | Kerapatan Jalan |
|-----------|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| 13 | Sumatera Utara | 26.185 | 49,50 |
| 14 | NTB | 10.691 | 43,55 |
| 15 | Gorontalo | 10.703 | 40,85 |
| 16 | Sulawesi Barat | 17.012 | 40,62 |
| 17 | NTT | 7.236 | 39,95 |
| 18 | Bengkulu | 13.522 | 38,99 |
| 19 | Aceh | 20.164 | 38,76 |
| 20 | Sulawesi Tenggara | 13.112 | 30,71 |
| 21 | Kep. Bangka Belitung | 26.784 | 29,93 |
| 22 | Sulawesi Tengah | 21.052 | 29,73 |
| 23 | Kalimantan Selatan | 20.051 | 29,28 |
| 24 | Riau | 79.786 | 27,25 |
| 25 | Jambi | 22.508 | 24,81 |
| 26 | Sumatera Selatan | 26.742 | 17,86 |
| 27 | Maluku Utara | 6.929 | 16,72 |
| 28 | Maluku | 8.134 | 15,39 |
| 19 | Kalimantan Barat | 16.421 | 10,00 |
| 30 | Kalimantan Tengah | 23.987 | 8,96 |
| 31 | Papua Barat | 61.462 | 8,24 |
| 32 | Kalimantan Timur | 111.210 | 7,22 |
| 33 | Papua | 30.713 | 5,06 |
| | Indonesia | 33.531 | 25,99 |

Sumber: BPS (2012), Statistik Kementerian PU (2013)

Gambar 10
Hubungan antara Kerapatan Jalan dan GDP Per Kapita Tahun 2012



Sumber: BPS (2013), Statistik Kementerian PU (2013)-diolah

Berdasarkan asumsi terdapat korelasi antara tingkat kerapatan jalan dan tingkat pendapatan perkapita dalam suatu perekonomian, dengan menggunakan data 33 provinsi terlihat hubungan positif antara PDRB per kapita dan tingkat kerapatan jalan (Gambar 10). Semakin tinggi pendapatan per kapita wilayah kerapatan jalannya cenderung tinggi pula. Wilayah yang posisinya di bawah kurva linier tersebut berarti mengalami defisiensi infrastruktur jalan. Dengan menggunakan ukuran ini terlihat bahwa posisi Kalimantan Selatan relatif tidak lebih baik dibandingkan provinsi lain di Indonesia.

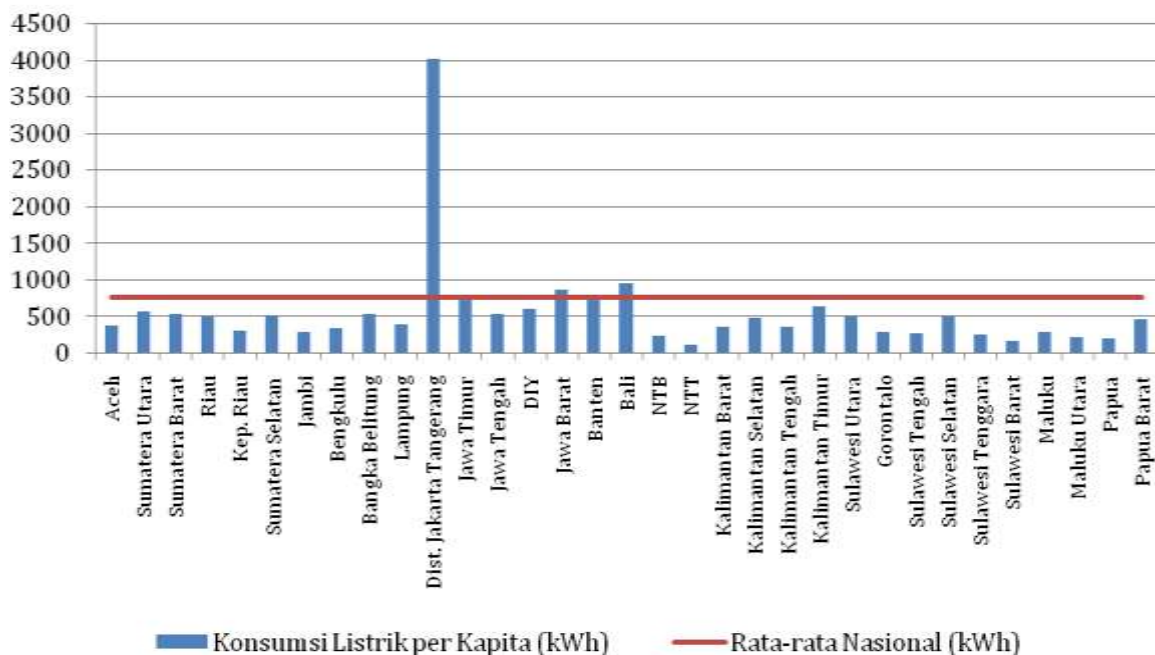
Secara kualitas, kondisi jalan di Kalimantan Selatan cukup baik karena 80 persen sudah beraspal (Tabel 7). Perawatan jalan yang sudah ada perlu mendapat perhatian untuk menghindari kerusakan jalan yang berdampak pada terhambatnya peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Tantangan yang harus diatasi adalah perawatan dan peningkatan kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 7
Panjang Jalan Nasional Menurut Jenis Permukaan Tahun 2012

| PROVINSI | JENIS PERMUKAAN JALAN | | | | | | | | Total | |
|--------------------|-----------------------|----|---------|----|-------|---|---------|---|--------|-----|
| | Aspal | | Kerikil | | Tanah | | Lainnya | | | |
| | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % | Km | % |
| Kalimantan Selatan | 661 | 81 | 86 | 11 | 61 | 8 | 4 | 0 | 812 | 100 |
| Kalimantan | 4.660 | 81 | 615 | 11 | 429 | 8 | 23 | | 5.727 | 100 |
| INDONESIA | 42.284 | 79 | 5018 | 9 | 3504 | 7 | 2836 | 5 | 53.642 | 100 |

Sumber: BPS, 2012

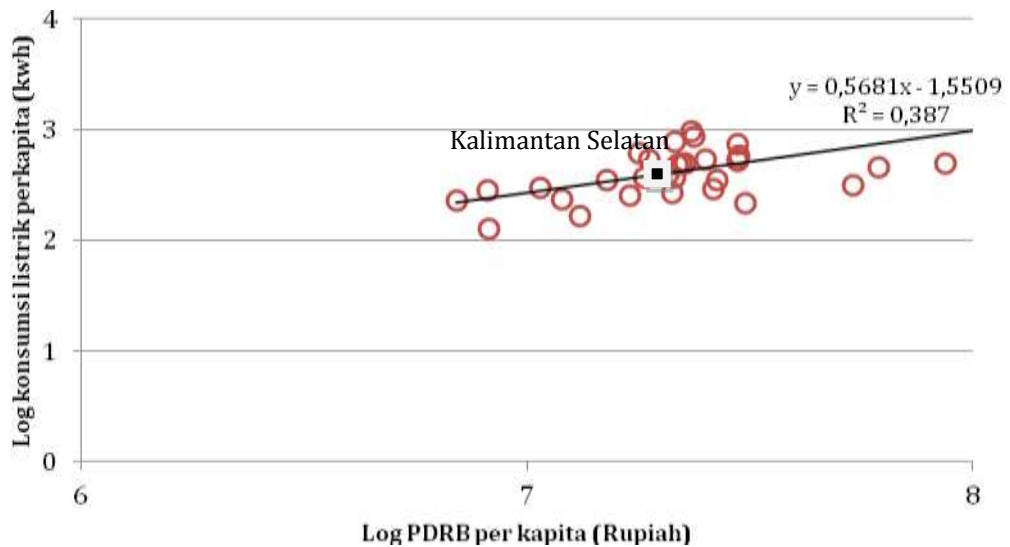
Gambar 11
Konsumsi Listrik per Kapita (kWh) Tahun 2013



Sumber: Statistik PLN, 2013

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah kelistrikan. Dengan membandingkan kondisi di 33 provinsi, konsumsi listrik perkapita di Kalimantan Selatan berada sedikit di bawah rata-rata nasional (Gambar 11). Untuk mengetahui defisiensi kelistrikan di Kalimantan Selatan digunakan cara yang sama, yaitu dengan mengetahui hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat konsumsi listrik. Wilayah yang terletak di bawah kurva linier mengalami defisiensi infrastruktur listrik.

Gambar 12
Hubungan Konsumsi Listrik dan Pendapatan Tahun 2013



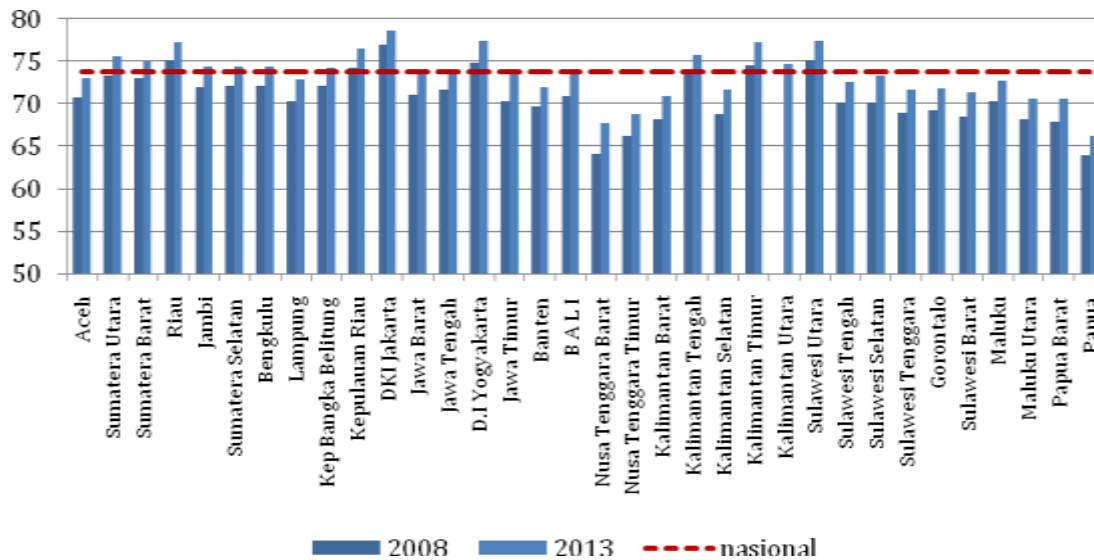
Sumber: BPS (2013), Statistik PLN (2013) - diolah

5. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan perluasan pembangunan ekonomi daerah. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Faktor yang mungkin menghambat pertumbuhan Kalimantan Selatan adalah kualitas sumber daya manusianya yang relatif rendah.

Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan pada tahun 2008 masih berada di bawah rata-rata nasional dan berada pada peringkat 26 dari 33 provinsi. Ketertinggalan Kalimantan Selatan terutama adalah pada indikator angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang masih berada jauh dari rata-rata nasional. Pada tahun 2013, angka harapan hidup sebesar 64,82 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah di Kalimantan Selatan tahun 2013 mencapai 8,01 tahun. Sebagai perbandingan, angka tertinggi di Kalimantan adalah 8,8 tahun (Kalimantan Timur), dan angka tertinggi di tingkat nasional adalah 10,8 tahun (DKI Jakarta), serta angka rata-rata nasional adalah 8,14 tahun.

Gambar 13
Nilai IPM Provinsi di Indonesia Tahun 2008 dan 2013



Sumber: BPS, 2013

Rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan juga terlihat lebih jelas dari struktur angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Proporsi angkatan kerja dengan ijazah minimal SMA (SMU, SMK, Diploma, Universitas) meningkat dari tahun 2008 ke tahun 2014 (Tabel 8). Perbaikan struktur angkatan kerja ini perlu terus didorong untuk mendukung transformasi ekonomi daerah berbasis agroindustri.

Tabel 8
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

| No. | Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan | 2008 | 2014 | Perubahan |
|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | ≤ SD | 1.020.149 | 2.093.090 | 1.072.941 |
| 2 | SMTp | 326.651 | 948.412 | 621.761 |
| 3 | SMTA Umum | 328.204 | 1.703.227 | 1.375.023 |
| 5 | Diploma I/II/III/Akademi | 43.214 | 206.318 | 163.104 |
| 6 | Universitas | 62.002 | 528.045 | 466.043 |
| Total | | 1.780.220 | 5.479.092 | 3.698.872 |

Sumber: BPS, 2013

6. Terbatasnya Mobilitas Tabungan Masyarakat

Tabungan masyarakat yang dihimpun bank umum dan BPR di Provinsi Kalimantan Selatan ternyata sedikit lebih tinggi dibanding pinjaman yang dikucurkan. Kondisi ini mengindikasikan cukupnya dana perbankan di daerah yang bisa dikonversi menjadi investasi bagi kegiatan produktif. Rasio antara pinjaman dan simpanan masyarakat di Bank Umum dan BPR fluktuatif dari 0,79 pada tahun 2007 dan 0,94 pada tahun 2009 serta 1,19 pada tahun 2013.

Tabel 9
Rasio Simpanan dan Pinjaman di Bank Umum dan BPR Tahun 2013

| Wilayah | Posisi Simpanan di Bank Umum dan BPR (Milyar Rp) | Posisi Pinjaman di bank Umum dan BPR (Milyar Rp) | Rasio Pinjaman terhadap Simpanan | Rasio PMTB terhadap Simpanan |
|--------------------|--|--|----------------------------------|------------------------------|
| Kalimantan Selatan | 36.240 | 43.019 | 1,19 | 0,52 |
| Kalimantan | 173,718 | 217.741 | 1,25 | 0,80 |
| Nasional | 3.575.891 | 3.322.683 | 0,92 | 0,47 |

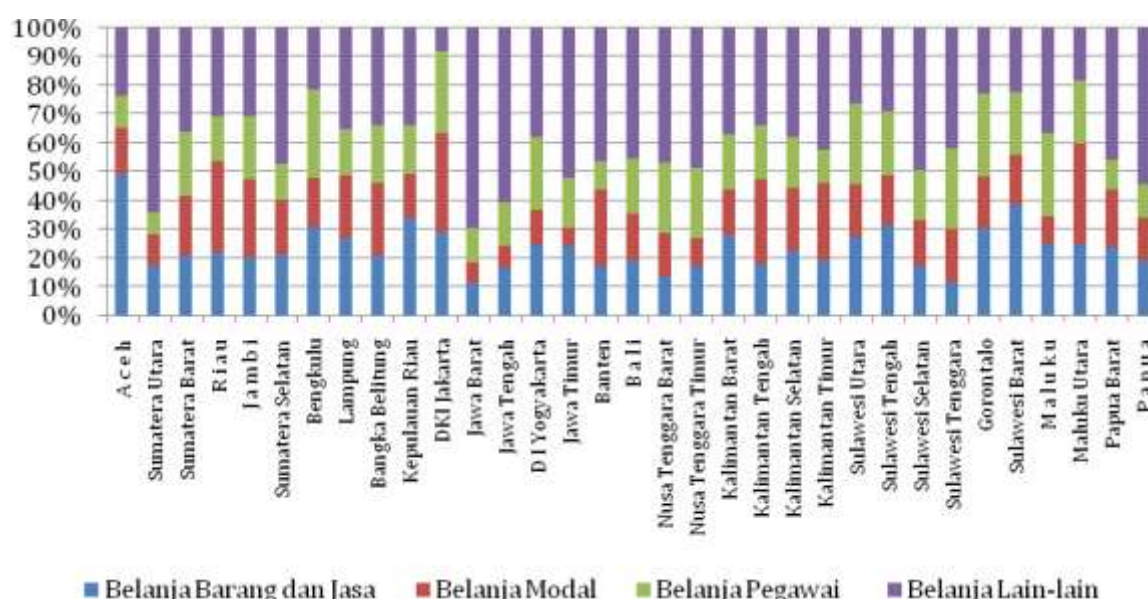
Sumber: BPS, 2013

Dalam jangka panjang terbatasnya sumber dana pinjaman ini akan berisiko meningkatkan harga modal (*cost of fund*) di daerah. Dengan kondisi tiinginya permintaan kredit, bank-bank umum mungkin menerapkan tingkat bunga kredit yang sama antardaerah, namun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya tentu akan meningkatkan imbal hasil (bunga) pinjaman. Kenaikan bunga pinjaman akan memberatkan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah mengembangkan kerjasama dengan perbankan dalam penjaminan kredit dan mobilisasi tabungan masyarakat.

7. Kualitas Belanja Daerah

Berdasarkan data total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tahun 2013, porsi belanja modal dalam total belanja APBD di Kalimantan Selatan sebesar 21,96 persen. Sementara itu porsi belanja pegawai, meliputi belanja pegawai dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung besarnya 17,72 persen (Gambar 14).

Gambar 14
Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013



Sumber: BPS, 2013

Ke depan perlu didorong perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih mengarah pada belanja modal. Belanja modal memiliki dampak langsung yang relatif besar kepada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, namun perannya tidak tergantikan dalam suatu perekonomian. Pembangunan prasarana publik seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik mutlak memerlukan peran pemerintah. Peran investasi pemerintah ini dirasa semakin penting di daerah-daerah yang level investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini adalah sebagai perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.

D. Prospek Pembangunan Tahun 2015

Daerah dengan tingkat pendapatan perkapita relatif rendah pada umumnya akan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena investasi akan memberikan tambahan output (*marginal product of capital*) yang lebih tinggi. Demikian juga halnya dengan Provinsi Kalimantan Selatan, prospek pertumbuhan daerah di tahun 2013 akan ditentukan oleh seberapa besar realisasi investasi di daerah. Dalam konteks ini Provinsi Kalimantan Selatan memiliki modal berharga. Struktur angkatan kerja mengalami pergeseran yang kondusif bagi industrialisasi. Secara relatif angkatan kerja masih didominasi lulusan setingkat SMP ke bawah, namun secara konsisten porsi lulusan SMA ke atas meningkat. Hal ini penting mengingat salah satu faktor yang mendorong pengembangan industri adalah tersedianya *pool* angkatan kerja dengan ketrampilan dan spesialisasi yang cukup dalam jumlah yang banyak.

Berdasarkan kinerja pembangunan selama ini dan modal pembangunan yang dimiliki, prospek pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 dalam mendukung pencapaian target utama RPJMN 2015-2019 sebagai berikut:

1. Sasaran pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 5,0 – 8,6 persen dapat tercapai. Di Kawasan Timur Indonesia kinerja ekonomi akan semakin membaik berkat meningkatnya produksi pertanian dan aktivitas pertambangan setelah diberlakukannya ijin ekspor mineral bagi para penambang besar. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan telah meningkat pada akhir 2014 melebihi perkiraan sebelumnya. Kalimantan Selatan memiliki sumber daya alam melimpah yang berpotensi untuk terus meningkatkan PDRB di wilayah ini.
2. Sasaran pengurangan tingkat kemiskinan dalam Buku III RPJMN 2015-2019 adalah 4,5 – 3,2 persen, sedangkan pada tahun 2013 tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,77 persen, untuk itu diperlukan upaya konsisten untuk menurunkan tingkat kemiskinan di provinsi ini. Selama kurun waktu 2014-2019 Provinsi Kalimantan Selatan harus menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 1,57 poin persentase atau 0,26 poin persentase per tahun.
3. Prospek pencapaian sasaran-sasaran utama pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan akan sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan baik internal daerah Kalimantan Selatan maupun lingkungan eksternal. Dampak krisis di Eropa dan pelambatan arus perdagangan global merupakan ancaman eksternal yang bisa

mengganggu kinerja perekonomian daerah melalui transmisi berkurangnya perdagangan komoditas ekspor kopi, udang, kakao, kelapa sawit, dan karet.

E. Penutup

1. Isu Strategis Daerah

Dari hasil analisis dan informasi yang tersedia, dan memperhatikan kriteria isu strategis: (i) berdampak besar bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional; (ii) merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah; dan (iii) mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki, maka isu-isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas sektor pertanian
- b. Industrialisasi dan pengembangan lapangan kerja berkualitas
- c. Peningkatan investasi di daerah
- d. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan suplai kelistrikan
- e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- f. Mobilisasi tabungan masyarakat dan fungsi intermediasi perbankan untuk mendorong akses permodalan usaha
- g. Peningkatan kualitas belanja modal pemerintah daerah

2. Rekomendasi Kebijakan

Penanganan isu-isu strategis daerah diperkirakan akan dapat meningkatkan kinerja perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang perlu ditempuh dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan usaha kecil, menengah, dan koperasi khususnya dalam hal akses permodalan dan penguasaan teknologi tepat guna;
- b. Pemberdayaan petani dan nelayan khususnya dalam hal perbaikan akses faktor produksi (pupuk, benih, pestisida) termasuk peningkatan jaringan irigasi, penyuluhan dan promosi *brand/citra* komoditas unggulan daerah;
- c. Peningkatan kemudahan perijinan usaha;
- d. Perbaikan kualitas jaringan jalan;
- e. Peningkatan kapasitas/suplai listrik wilayah;
- f. Peningkatan akses pendidikan khususnya pendidikan menengah (umum dan kejuruan);
- g. Peningkatan porsi belanja modal APBD yang diprioritaskan pada sektor infrastruktur yang menjadi kewenangan daerah;
- h. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan otoritas moneter di tingkat wilayah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif: peningkatan fungsi intermediasi perbankan di daerah, penjaminan kredit dan pengendalian inflasi daerah.

